



**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 546 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA**

**TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional dipandang perlu menambah Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terdiri dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
- b. bahwa untuk penambahan pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020);
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 65);
7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1197 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 386 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Nasional Tahun Anggaran 2023.

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-290/MK.02/2023 tanggal 10 April 2023;
2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 24438/B-BP.02.01/SD/K/2022 tanggal 29 Juli 2022;
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023;
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 Nomor PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan;
5. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 200/I/HK/2023 tanggal 5 Juni 2023 tentang Kualifikasi Pendidikan dalam Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Formasi Jabatan Fungsional Peneliti.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten/Kota dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Masa Perjanjian Kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
- KETIGA : Kualifikasi pendidikan bagi Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023.
- KEEMPAT : Kualifikasi pendidikan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan pada Instansi Pemerintah merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 Nomor PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan.
- KELIMA : Kualifikasi pendidikan bagi Jabatan Fungsional Peneliti pada Instansi Pemerintah merujuk pada Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 200/I/HK/2023 tanggal 5 Juni 2023 tentang Kualifikasi Pendidikan dalam Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Formasi Jabatan Fungsional Peneliti.
- KEENAM : Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut, dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 20 Juli 2023

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

  
ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN CCLXXXII  
 KEPUTUSAN MENTERI  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 546 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI  
 APARATUR SIPIL NEGARA DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN  
 2023

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

TENAGA GURU

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
1.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	19	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
2.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
3.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
4.	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
5.	AHLI PERTAMA - GURU IPA	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
6.	AHLI PERTAMA - GURU IPS	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
7.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	21	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
8.	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
9.	AHLI PERTAMA - GURU PENJABORKES	4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
10.	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
11.	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
12.	AHLI PERTAMA - GURU TIK	3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
	TOTAL	80	

panrb

KEMENTERIAN  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI

LAMPIRAN CCLXXXII  
KEPUTUSAN MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 546 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN  
2023

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

TENAGA KESEHATAN

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
1.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	1	30391	RSUD DAHA SEJAHTERA
2.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	1	28628	RSU BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN
3.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH	1	30391	RSUD DAHA SEJAHTERA
4.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS BEDAH	1	28628	RSU BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN
5.	AHLI PERTAMA - DOKTER	2	30391	RSUD DAHA SEJAHTERA
6.	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	24058	PUSKESMAS KALUMPONG
7.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	24061	PUSKESMAS BARUH JAYA
8.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	2	24054	PUSKESMAS SUNGAI RAYA
9.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	24062	PUSKESMAS BAJAYAU
10.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	24076	PUSKESMAS MALINAU
11.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	24048	PUSKESMAS TELAGA LANGSAT
12.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	24050	PUSKESMAS RAMBAN
13.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	24053	PUSKESMAS JAMBU HILIR
14.	AHLI PERTAMA - PENATA ANESTESI	1	28628	RSU BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN
15.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1	24046	PUSKESMAS MALINAU
16.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1	28628	RSU BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN
17.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1	30391	RSUD DAHA SEJAHTERA
18.	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	30391	RSUD DAHA SEJAHTERA
19.	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	24046	PUSKESMAS TELAGA LANGSAT
20.	TERAMPIL - ASISTEN PENATA ANESTESI	2	28628	RSU BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN
21.	TERAMPIL - BIDAN	2	24044	PUSKESMAS PADANG BATUNG
22.	TERAMPIL - BIDAN	2	24046	PUSKESMAS MALINAU
23.	TERAMPIL - BIDAN	1	24049	PUSKESMAS ANDINANG
24.	TERAMPIL - BIDAN	1	24057	PUSKESMAS WASAH
25.	TERAMPIL - BIDAN	2	24059	PUSKESMAS BAYANAN
26.	TERAMPIL - BIDAN	3	24060	PUSKESMAS SUNGAI PINANG
27.	TERAMPIL - BIDAN	3	24063	PUSKESMAS NEGARA
28.	TERAMPIL - BIDAN	3	24064	PUSKESMAS PASUNGAN
29.	TERAMPIL - BIDAN	2	30391	RSUD DAHA SEJAHTERA
30.	TERAMPIL - PERAWAT	6	30391	RSUD DAHA SEJAHTERA
31.	TERAMPIL - PERAWAT	2	24046	PUSKESMAS MALINAU
32.	TERAMPIL - PERAWAT	3	24063	PUSKESMAS NEGARA
33.	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	2	28628	RSU BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN
34.	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	24057	PUSKESMAS WASAH
35.	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	24055	PUSKESMAS BATANG KULUR
36.	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	24054	PUSKESMAS SUNGAI RAYA
37.	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	24053	PUSKESMAS JAMBU HILIR
38.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	28628	RSU BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN
39.	TERAMPIL - RADIOGRAFER	2	28628	RSU BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN
40.	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	24045	PUSKESMAS KALIREJO
41.	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	24060	PUSKESMAS SUNGAI PINANG
42.	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	24059	PUSKESMAS BAYANAN
43.	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	24062	PUSKESMAS BAJAYAU
TOTAL		79		

LAMPIRAN CCLXXXII  
KEPUTUSAN MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 546 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN  
2023

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
1.	AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM	D-IV ILMU HUKUM;S-1 ILMU HUKUM	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA , BAGIAN HUKUM
2.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBLIJAKAN	S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 PENDIDIKAN SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN ORGANISASI
3.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBLIJAKAN	D-IV ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA;S-1 MANAJEMEN KEBLIJAKAN PUBLIK;S-1 ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN;D-IV ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN;S-1 KEBLIJAKAN PUBLIK;D-IV KEBLIJAKAN PUBLIK	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , BADAN KESATUAN BANGSA DAN KESEKUTUPAN , KABID POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
4.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBLIJAKAN	S-1 PENDIDIKAN SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;D-IV ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA;S-1 MANAJEMEN KEBLIJAKAN PUBLIK;S-1 ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN;S-1 KEBLIJAKAN PUBLIK;D-IV KEBLIJAKAN PUBLIK	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA , BAGIAN PEMERINTAHAN
5.	AHLI PERTAMA - ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN	S-1 AGRIBISNIS;S-1 AGROTEKNOLOGI;S-1 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN;S-1 TEKNIK HASIL PERTANIAN;D-IV PERTANIAN;S-1 PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN;S-1 PANGAN DAN NUTRISI;D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN;S-1 PENYULUHAN PERTANIAN;S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN	2	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , DINAS KETAHANAN PANGAN KAB HSS
6.	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 MANAJEMEN DAN KEBLIJAKAN PUBLIK;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN;S-1 ILMU INFORMATIKA;S-1 KEBLIJAKAN PEMERINTAHAN;S-1 TEKNIK INFORMATIKA;D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK;S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , DIREKTUR RSUD BRIGJEND H. HASAN BASRY
7.	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
8.	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 MANAJEMEN;S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA;D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , DINAS PERKARAN
9.	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 MANAJEMEN;S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
10.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 MANAJEMEN;S-1 ADMINISTRASI BISNIS;S-1 PENDIDIKAN FISIKA;S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING;S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI;S-1 AKUNTANSI;S-1 LINGKUNGAN	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
11.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ARSIPARIS;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;D-IV ARSIPARIS;S-1 ADMINISTRASI	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , DINAS PERPUSTAKAN DAN KEARSIPAN
12.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ARSIPARIS;D-IV ARSIPARIS;S-1 KEARSIPAN;D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP;D-IV KEARSIPAN;D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI;D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA;S-1 PERPUSTAKAAN;D-IV PERPUSTAKAAN;S-1 PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
13.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ARSIPARIS;D-IV ARSIPARIS;S-1 KEARSIPAN;D-IV KEARSIPAN;S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA;D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA;S-1 PERPUSTAKAAN;D-IV PERPUSTAKAAN;D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



## TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
14.	AHLI PERTAMA - PAMONG BELAJAR	S-1 KURIKULUM DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN;S-1 PSIKOLOGI PENDIDIKAN;S-1 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI;S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN;S-1 EVALUASI PENDIDIKAN;D-IV KURIKULUM DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN;D-IV PSIKOLOGI PENDIDIKAN;D-IV PENDIDIKAN ANAK USIA DINI;D-IV MANAJEMEN PENDIDIKAN;D-IV EVALUASI PENDIDIKAN	15	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
15.	AHLI PERTAMA - PEKERJA SOSIAL	S-1 PEKERJAAN SOSIAL;D-IV PEKERJAAN SOSIAL;D-IV KESEJAHTERAAN SOSIAL;S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , DINAS SOSIAL
16.	AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	S-1 ILMU ADMINISTRASI;S-1 ILMU HUKUM;S-1 MANAJEMEN;S-1 MANAJEMEN BENCANA;S-1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , PELAKSANA
17.	AHLI PERTAMA - PENGAJAS KEMETROLOGIAN	S-1 TEKNIK MESIN;S-1 TEKNIK SIPIL	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , DINAS PERDAGANGAN
18.	AHLI PERTAMA - PENGAJAS MUTU HASIL PERTANIAN	S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN;S-1 AGROBISNIS;S-1 AGROTEKNOLOGI;S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN	2	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , DINAS PERTANIAN
19.	AHLI PERTAMA - PENGAJAS MUTU HASIL PERTANIAN	S-1 KIMIA;S-1 PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN;S-1 TEKNIK HASIL PERTANIAN;S-1 PENYULUHAN PERTANIAN;S-1 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN;S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN;D-IV PERTANIAN;S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN;S-1 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN;S-1 TEKNIK KIMIA;S-1 ILMU PANGAN;S-1 PANGAN DAN NUTRISI;S-1 PANGAN DAN NUTRISI;D-IV TEKNOLOGI PRODUKSI PANGAN;S-1 EKONOMI PERTANIAN	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , DINAS KETAHANAN PANGAN KAB.HSS
20.	AHLI PERTAMA - PENGAJAS MUTU PAKAN	S-1 TEKNOLOGI HASIL TERNAK;S-1 PRODUKSI PETERNAKAN;S-1 ILMU PETERNAKAN;S-1 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN;S-1 TEKNOLOGI PAKAN TERNAK;S-1 BUDIDAYA PETERNAKAN	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , DINAS PERTANIAN
21.	AHLI PERTAMA - PENGAJAS DAMPAK LINGKUNGAN	S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN;S-1 PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN;S-1 TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN;S-1 TEKNIK LINGKUNGAN;S-1 ILMU LINGKUNGAN	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , DINAS PERUMAHAN RAKYAT-KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP , KABID PELESTARIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP
22.	AHLI PERTAMA - PENGAJAS SWADAYA MASYARAKAT	S-1 EKONOMI;S-1 ILMU POLITIK;S-1 HUKUM;S-1 PSIKOLOGI;S-1 ILMU KOMUNIKASI;S-1 ILMU PERTANIAN;S-1 ADMINISTRASI NEGARA	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA , BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
23.	AHLI PERTAMA - PENGAJAS SWADAYA MASYARAKAT	S-1 EKONOMI;S-1 ILMU POLITIK;S-1 HUKUM;S-1 PSIKOLOGI;S-1 ILMU KOMUNIKASI;S-1 ILMU PERTANIAN;S-1 ADMINISTRASI NEGARA	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA , KABID PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DESA
24.	AHLI PERTAMA - PENYULUH HUKUM	S-1 ILMU HUKUM;D-IV ILMU HUKUM	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA , BAGIAN HUKUM
25.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 MANAJEMEN;D-IV MANAJEMEN;S-1 AKUNTANSI;D-IV AKUNTANSI;S-1 EKONOMI;D-IV EKONOMI;S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA;D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;D-IV ILMU PEMERINTAHAN	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN , SEKRETARIAT DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN , KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
26.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ILMU KEPEGAWAIAN;S-1 EKONOMI MANAJEMEN SDM;S-1 MANAJEMEN ADMINISTRASI;S-1 ADMINISTRASI PERKANTORAN;S-1 KESEKRETARIATAN;S-1 MANAJEMEN;S-1 PEMERINTAHAN;S-1 SOSIAL POLITIK;S-1 KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 SOSIOLOGI;S-1 EKONOMI;S-1 AKUNTANSI	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , SEKRETARIAT DPRD , BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN , KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
27.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA;S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN;S-1 SISTEM INFORMATIKA;S-1 INFORMATIKA;S-1 EKONOMI;D-IV EKONOMI;S-1 AKUNTANSI;D-IV AKUNTANSI;S-1 MANAJEMEN;D-IV MANAJEMEN	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH , SEKRETARIAT BADAN PERENCANAAN PEMD , PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH , KASUBBAG PERENCANAAN
28.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA;D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;D-IV ILMU PEMERINTAHAN;S-1 ILMU SOSIAL;D-IV ILMU SOSIAL;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;D-IV ADMINISTRASI NEGARA;S-1 EKONOMI;S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN;S-1 TEKNIK SIPIL	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCARA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK , SEKRETARIAT DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK , KASUBBAG PERENCANAAN
29.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 MANAJEMEN;D-IV MANAJEMEN;S-1 EKONOMI;D-IV EKONOMI;S-1 AKUNTANSI;D-IV AKUNTANSI;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;D-IV ILMU PEMERINTAHAN;S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA;D-IV TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA , SEKRETARIAT DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA , KASUBBAG PERENCANAAN DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA

## TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI SPPK	UNIT PENEMPATAN
30.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 MANAJEMEN;D-IV MANAJEMEN;S-1 AKUNTANSI;D-IV AKUNTANSI;S-1 EKONOMI;D-IV EKONOMI;S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA;S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , INSPEKTORAT , SEKRETARIAT INSPEKTORAT , KASUBBAG PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN INSPEKTORAT
31.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI AKUNTANSI;S-1 ILMU EKONOMI;D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN;S-1 EKONOMI;D-IV EKONOMI AKUNTANSI;D-IV SOSIAL;D-IV ILMU EKONOMI;D-IV EKONOMI;S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN;S-1 SOSIAL	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG , SEKRETARIAT , KASUBBAG PERENCANAAN
32.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 MANAJEMEN;D-IV MANAJEMEN;S-1 AKUNTANSI;D-IV AKUNTANSI;S-1 EKONOMI;D-IV EKONOMI;S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA;S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , DINAS PENDIDIKAN , SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN , KASUBAG PERENCANAAN
33.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	D-IV TEKNOLOGI PRODUKSI PANGAN;D-IV GIZI;S-1 GIZI;S-1 GIZI MASYARAKAT;S-1 KOMPUTER AKUNTANSI;S-1 GIZI DAN KESEHATAN MASYARAKAT;S-1 KOMPUTER;S-1 KOMPUTER INFORMATIKA;S-1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN;S-1 PANGAN;D-IV PERENCANAAN PEMBANGUNAN;D-IV KOMPUTER MULTIMEDIA;S-1 KOMPUTER DAN SISTEM INFORMATIKA	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , DINAS KETAHANAN PANGAN KAB.HSS , SEKRETARIAT , KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
34.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN;D-IV PERENCANAAN PEMBANGUNAN	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL , SEKRETARIAT DISDUKCATPIL , KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN DISDUKCATPIL
35.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ILMU KEPENGAWAHAN;S-1 EKONOMI MANAJEMEN ;SDM;S-1 MANAJEMEN ADMINISTRASI;S-1 ADMINISTRASI PERKANTORAN;S-1 KESEKRETARIATAN;S-1 MANAJEMEN;S-1 PEMERINTAHAN;S-1 SOSIAL POLITIK;S-1 KEBLAKAKAN PUBLIK;S-1 SOSIOLOGI;S-1 EKONOMI;S-1 AKUNTANSI	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , DINAS KESEHATAN , SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN , KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
36.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 MANAJEMEN;S-1 AKUNTANSI;D-IV AKUNTANSI;S-1 EKONOMI;S-1 ILMU KEPENGAWAHAN;S-1 EKONOMI MANAJEMEN SDM;S-1 MANAJEMEN ADMINISTRASI;S-1 ADMINISTRASI PERKANTORAN;S-1 KESEKRETARIATAN;S-1 KEBLAKAKAN PUBLIK;S-1 SOSIOLOGI;S-1 SOSIAL POLITIK	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , DINAS SOSIAL , SEKRETARIAT DINAS SOSIAL , KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN DINAS SOSIAL
37.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 ILMU SOSIAL;S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN;S-1 EKONOMI;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 STATISTIK;S-1 TEKNIK SIPIL	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
38.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 EKONOMI;S-1 AKUNTANSI;S-1 MANAJEMEN;S-1 ILMU KEPENGAWAHAN;S-1 ADMINISTRASI PERKANTORAN;S-1 SOSIAL POLITIK;S-1 SOSIOLOGI;S-1 EKONOMI MANAJEMEN;S-1 MANAJEMEN ADMINISTRASI;S-1 KESEKRETARIATAN	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , DINAS PERHUBUNGAN , SEKRETARIAT DISHUB , KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN DISHUB
39.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 MANAJEMEN;S-1 AKUNTANSI;S-1 EKONOMI	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , DINAS PERUMAHAN RAKYAT , KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP , SEKRETARIAT DINAS PERUMAHAN RAKYAT , KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP , KASUBAG PERENCANAAN
40.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ILMU KEPENGAWAHAN;S-1 EKONOMI MANAJEMEN ;SDM;S-1 MANAJEMEN ADMINISTRASI;S-1 ADMINISTRASI PERKANTORAN;S-1 KESEKRETARIATAN;S-1 MANAJEMEN;S-1 PEMERINTAHAN;S-1 SOSIAL POLITIK;S-1 SOSIOLOGI;S-1 KEBLAKAKAN PUBLIK	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA , SEKRETARIAT SATPOL PP , KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
41.	AHLI PERTAMA - PERISALAH LEGISLATIF	S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK/NEGARA;S-1 ILMU ADMINISTRASI BISNIS/NIAGA;S-1 ILMU ADMINISTRASI FISKAL/PERPAJAKAN;S-1 ILMU EKONOMI;S-1 ILMU MANAJEMEN;S-1 AKUNTANSI;S-1 ILMU POLITIK;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , SEKRETARIAT DPRD
42.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI;S-1 ILMU KOMUNIKASI/HUBUNGAN MASYARAKAT;D-IV ILMU HUBUNGAN MASYARAKAT;D-IV KOMUNIKASI;D-IV MANAJEMEN KOMUNIKASI	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
43.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
44.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER;S-1 TEKNIK KOMPUTER;S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER;S-1 INFORMATIKA;S-1 TEKNIK INFORMATIKA;S-1 ILMU INFORMATIKA;S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI;S-1 TEKNOLOGI INFORMASI;S-1 SISTEM KOMPUTER	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , SEKRETARIAT DPRD

## TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
45.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , DINAS PERHUBUNGAN
46.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA;D-IV TEKNIK INFORMATIKA	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
47.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER;S-1 TEKNIK KOMPUTER;D-IV TEKNIK KOMPUTER;D-IV TEKNIK INFORMATIKA	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , DINAS PERTANIAN
48.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM KOMPUTER;S-1 TEKNIK KOMPUTER;S-1 ILMU KOMPUTER;S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER;S-1 TEKNIK INFORMATIKA;S-1 INFORMATIKA;S-1 SAINS DATA;D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN;D-IV SISTEM INFORMASI;D-IV TEKNIK KOMPUTER	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , DINAS KETAHANAN PANGAN KAB.HSS
49.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER;S-1 SISTEM KOMPUTER;S-1 TEKNIK KOMPUTER;S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER;S-1 INFORMATIKA;S-1 TEKNIK INFORMATIKA;S-1 ILMU INFORMATIKA;S-1 SISTEM INFORMASI;S-1 TEKNOLOGI INFORMASI;S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI;S-1 REKAYASA PIRANTI LUNAK;S-1 SAINS DATA	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , DINAS PERUMAHAN BAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
50.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER;S-1 SISTEM KOMPUTER;S-1 ILMU INFORMATIKA;S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER;S-1 INFORMATIKA;S-1 SISTEM INFORMASI;S-1 TEKNIK KOMPUTER;S-1 TEKNIK INFORMATIKA;S-1 TEKNOLOGI INFORMASI;S-1 SAINS DATA;S-1 REKAYASA PIRANTI LUNAK;S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
51.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER;S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPIS DAN PERLINDUNGAN ANAK
52.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , DINAS PERDAGANGAN
53.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER;S-1 SISTEM KOMPUTER;S-1 TEKNIK KOMPUTER;S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER;S-1 INFORMATIKA;S-1 TEKNIK INFORMATIKA;S-1 ILMU INFORMATIKA;S-1 SISTEM INFORMASI;S-1 TEKNOLOGI INFORMASI;S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI;S-1 REKAYASA PIRANTI LUNAK;S-1 SAINS DATA	4	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
54.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM INFORMASI;S-1 TEKNIK INFORMATIKA	2	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
55.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER;S-1 SISTEM KOMPUTER;S-1 TEKNIK KOMPUTER;S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER;D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN;D-IV TEKNIK KOMPUTER;D-IV KOMPUTASI STATISTIK	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA
56.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 SISTEM KOMPUTER;S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER;S-1 TEKNIK INFORMATIKA;S-1 TEKNIK KOMPUTER;S-1 ILMU INFORMATIKA;S-1 SISTEM INFORMASI;S-1 TEKNOLOGI INFORMASI;S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI;D-IV SISTEM INFORMASI;D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA;D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN;D-IV TEKNIK INFORMATIKA;D-IV TEKNIK KOMPUTER;S-1 INFORMATIKA	4	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
57.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER;S-1 SISTEM KOMPUTER;S-1 TEKNIK KOMPUTER;S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER;S-1 INFORMATIKA;S-1 TEKNIK INFORMATIKA;S-1 ILMU INFORMATIKA;S-1 SISTEM INFORMASI;S-1 TEKNOLOGI INFORMASI;S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI;S-1 REKAYASA PIRANTI LUNAK;D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN ORGANISASI
58.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
59.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER;S-1 SISTEM KOMPUTER;S-1 TEKNIK KOMPUTER;S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER;S-1 INFORMATIKA;S-1 TEKNIK INFORMATIKA;S-1 SISTEM INFORMASI;D-IV SISTEM INFORMASI;D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA;D-IV TEKNIK INFORMATIKA;D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , DINAS TENAGA KERJA, KOOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
60.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER;S-1 SISTEM KOMPUTER;S-1 TEKNIK KOMPUTER;S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER;S-1 INFORMATIKA;S-1 TEKNIK INFORMATIKA;S-1 ILMU INFORMATIKA;S-1 SISTEM INFORMASI;S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI;D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA;D-IV SISTEM INFORMASI;D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
61.	PEMULA - PEMADAM KEBAKARAN	SMA/SEDERAJAT	6	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR
62.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN/D-III ARSIPARIS/D-III KEARSIPAN/KEPERPUSTAKAAN	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , DINAS PERDAGANGAN
63.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN/KEPERPUSTAKAAN/D-III ADMINISTRASI KEARSIPAN/D-III KEARSIPAN/D-III KEARSIPAN DIGITAL/D-III ADMINIS BISNIS/MANAJEMEN PERKANTORAN/D-III PERPUSTAKAAN	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , DINAS PERPUSTAKAN DAN KEARSIPAN
64.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNOLOGI KOMPUTER/D-III TEKNIK KOMPUTER/D-III SISTEM INFORMASI/D-III TEKNOLOGI INFORMASI/D-III MANAJEMEN INFORMATIKA/D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR , KABID PEMADAM KEBAKARAN
65.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNOLOGI KOMPUTER/D-III TEKNIK KOMPUTER/D-III SISTEM INFORMASI/D-III TEKNOLOGI INFORMASI/D-III MANAJEMEN INFORMATIKA/D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , CAMAT ANGIKIRANG
66.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNOLOGI KOMPUTER/D-III TEKNIK KOMPUTER/D-III SISTEM INFORMASI/D-III TEKNOLOGI INFORMASI/D-III MANAJEMEN INFORMATIKA/D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , DINAS PERIKANAN
67.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNOLOGI KOMPUTER/D-III TEKNIK KOMPUTER/D-III SISTEM INFORMASI/D-III TEKNOLOGI INFORMASI/D-III MANAJEMEN INFORMATIKA/D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , CAMAT PADANG BATUNG
68.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNOLOGI KOMPUTER	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , CAMAT SIMPUR
69.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNOLOGI KOMPUTER/D-III TEKNIK KOMPUTER/D-III SISTEM INFORMASI/D-III TEKNOLOGI INFORMASI/D-III MANAJEMEN INFORMATIKA/D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
70.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNOLOGI KOMPUTER/D-III TEKNIK KOMPUTER/D-III SISTEM INFORMASI/D-III TEKNOLOGI INFORMASI/D-III MANAJEMEN INFORMATIKA/D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , CAMAT SUNGAI RAYA
71.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA/D-III SISTEM INFORMASI/D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , PELAKSANA
72.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III SISTEM INFORMASI/D-III TEKNOLOGI KOMPUTER/D-III TEKNIK KOMPUTER/D-III TEKNOLOGI INFORMASI/D-III MANAJEMEN INFORMATIKA/D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , CAMAT KALUMPANG
73.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNOLOGI KOMPUTER/D-III TEKNIK KOMPUTER/D-III SISTEM INFORMASI/D-III TEKNOLOGI INFORMASI/D-III MANAJEMEN INFORMATIKA/D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , CAMAT DAHA BARAT
74.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK KOMPUTER	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , CAMAT DAHA SELATAN
75.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK KOMPUTER/D-III TEKNOLOGI KOMPUTER/D-III TEKNOLOGI INFORMASI/D-III MANAJEMEN INFORMATIKA/D-III TEKNIK INFORMATIKA/D-III SISTEM INFORMASI	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , CAMAT DAHA UTARA
76.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNOLOGI KOMPUTER/D-III TEKNIK KOMPUTER/D-III SISTEM INFORMASI/D-III TEKNOLOGI INFORMASI/D-III MANAJEMEN INFORMATIKA/D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
77.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA/D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , BADAN KEUANGAN DAERAH
78.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK INFORMATIKA/D-III MANAJEMEN INFORMATIKA/D-III SISTEM INFORMASI/D-III TEKNIK KOMPUTER/D-III TEKNOLOGI INFORMASI	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , CAMAT LORSADO
79.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNOLOGI KOMPUTER/D-III TEKNIK KOMPUTER/D-III SISTEM INFORMASI/D-III TEKNOLOGI INFORMASI/D-III MANAJEMEN INFORMATIKA/D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , BADAN KEPERAWAAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
80.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK INFORMATIKA/D-III MANAJEMEN INFORMATIKA/D-III TEKNOLOGI INFORMASI/D-III TEKNIK KOMPUTER/D-III TEKNOLOGI KOMPUTER/D-III SISTEM INFORMASI	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , SEKRETARIAT DPRD
81.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNOLOGI KOMPUTER/D-III TEKNIK KOMPUTER/D-III SISTEM INFORMASI/D-III TEKNOLOGI INFORMASI/D-III MANAJEMEN INFORMATIKA/D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , DINAS SOSIAL

## TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI IPPK	UNIT PENEMPATAN
82.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNOLOGI KOMPUTER;D-III TEKNIK KOMPUTER;D-III SISTEM INFORMASI;D-III TEKNOLOGI INFORMASI;D-III MANAJEMEN INFORMATIKA;D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , CAMAT KANDANGAN
83.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNOLOGI KOMPUTER;D-III TEKNIK KOMPUTER;D-III SISTEM INFORMASI;D-III TEKNOLOGI INFORMASI;D-III MANAJEMEN INFORMATIKA;D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , CAMAT TELAGA LANGSAT
TOTAL			109	



# panrb

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI